



Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan Solusi

Cesar Sanabil Pasya¹, Genta Reznanda²

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas E-Government adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur jaringan internet lewat program Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Program tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pengembangan ekosistem digital. Namun ternyata—pada pelaksanaan program, ditemukan permasalahan berupa tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diperlukan beberapa langkah dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Diantaranya dapat dilakukan dengan memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan kapasitas pemerintah daerah dalam menunjang E-Government.

Keywords: *Dampak Korupsi, Pembangunan Infrastruktur, Kualitas E-Government*

(*) Corresponding Author: cesar.sanabil11@ui.ac.id¹, genta.reznanda@ui.ac.id²

How to Cite: Pasya, C., & Reznanda, G. (2024). Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 346-354. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13485449>

PENDAHULUAN

E-Government telah diupayakan untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari upaya langkah pemerintah dalam menyusun beberapa landasan hukum guna mengatur mengenai kebijakan strategi E-Government serta penunjang E-Government lainnya. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain adalah Inpres No. 6 Tahun 2001 Tentang Telematika, Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan masih banyak lagi. Implementasi dari landasan hukum yang telah disebutkan, dilakukan pemerintah melalui pembentukan beberapa lembaga, seperti Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Direktorat E-Government dalam Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan masih banyak lagi.

Melalui berbagai upaya tersebut, ternyata belum membuat Indonesia memiliki kualitas E-Government yang mumpuni. Berdasarkan survei yang

dilakukan oleh United Nation (UN), E-Government Development Index (EGDI) Indonesia pada tahun 2022 berada pada posisi ke-77. EGDI sendiri mengukur perkembangan E-Government suatu negara dengan penilaian kriteria tertentu yang dilakukan terhadap 193 negara anggota UN setiap dua tahun sekali. Kriteria yang menjadi dasar penilaian EGDI antara lain Telecommunications Infrastructure Index (TII), sebagai indeks yang mengukur ketersediaan infrastruktur penunjang E-Government di suatu negara; Human Capital Index (HCI), sebagai indeks yang mengukur kondisi demografis masyarakat di suatu negara; serta Online Service Index (OSI), sebagai indeks yang mengukur keterlibatan negara melalui situs resmi pemerintah serta kementerian di negara yang bersangkutan. Meskipun tahun 2022 Indonesia berada pada posisi terbaik sejak pertama kali survey EGDI dibuat, bukan berarti upaya perbaikan tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini disebabkan peringkat EGDI Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 terus mengalami fluktuasi.

Tabel 1. Peringkat Negara ASEAN dalam Pemeringkatan Perkembangan E-Government di Dunia

No.	Negara	2010	2012	2014	2016	2018	2020
1	Singapura	11	10	11	4	7	11
2	Malaysia	32	40	59	60	48	47
3	Thailand	76	92	54	77	73	57
4	Brunei	68	64	179	83	59	60
5	Filipina	78	88	51	71	75	77
6	Vietnam	90	83	65	89	88	86
7	Indonesia	109	97	110	116	107	88
8	Kamboja	140	155	137	158	145	124
9	Timor Leste	162	170	186	160	142	134
10	Myanmar	141	160	172	169	157	146
11	Laos	151	153	137	148	162	167

Olahan Penulis (2023)

Sumber: Gabungan Survey E-Government PBB, 2010-2020

Dapat dilihat dari tabel diatas, peringkat EGDI Indonesia selalu naik turun dari periode tahun 2010 hingga tahun 2016, tetapi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 peringkat EGDI Indonesia secara stabil meningkat. Ini menandakan bahwa potensi penurunan peringkat EGDI Indonesia di masa yang akan mendatang dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak terduga.

TINJAUAN TEORI

E-Government

Teori E-Government dapat diartikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah. Dengan kata lain, E-Government merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Alshehri and Drew, 2007). Menurut World Bank Group, E-Government merupakan penerapan teknologi informasi oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi hubungan antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses sistem pemerintahan sebagai suatu alat yang dapat memberikan kemudahan pada proses transaksi dan komunikasi antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik dengan konsep pengembangan yang menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizens (G2C) (Hartono dan Mulyanto, 2010). Tujuan dari penerapan e-government, yaitu meningkatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses yang luas terhadap informasi dari pemerintah dan kesempatan untuk berkomunikasi serta berpartisipasi aktif, mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam kinerja pemerintah, serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pengiriman layanan elektronik.

Collaborative Governance

Teori selanjutnya yang diterapkan dalam analisis ini adalah teori *Collaborative Governance*. Secara umum, "governance" mengacu pada proses, struktur, dan praktik yang terlibat dalam pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian suatu entitas atau organisasi, baik dalam sektor publik, swasta, maupun kombinasi keduanya. Ostrom (1990) memandang governance sebagai suatu dimensi yang mencakup norma-norma dan aturan-aturan yang disepakati bersama untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok. O'Leary, Bingham, dan Gerard (2006, 7) mendefinisikan governance sebagai suatu metode untuk mengarahkan proses yang memiliki dampak pada keputusan dan tindakan dalam berbagai sektor, termasuk swasta, publik, dan sipil. Bryson, Crosby, dan Stone (2006) mendefinisikan governance sebagai serangkaian kegiatan koordinasi dan pemantauan yang memungkinkan kelangsungan kemitraan atau institusi kolaboratif. Sedangkan, *Collaborative governance* merujuk pada pendekatan yang luas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen, yang secara konstruktif melibatkan partisipasi orang-orang dari berbagai lembaga publik, tingkatan pemerintahan, serta sektor masyarakat publik, swasta, dan sipil. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil yang tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama lintas-batas tersebut, sehingga mendorong adanya kolaborasi yang efektif dan harmonis dalam upaya mencapai tujuan publik yang lebih besar (Emerson dan Nabatchi, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam konteks studi ini merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk menganalisis secara menyeluruh dampak korupsi pada Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap E-Government di Indonesia. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, sesuai dengan judul "Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan Solusi". Howard S. Becker menyoroti pentingnya metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami semua kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti sendiri menjadi instrumen kunci.

Pada penelitian ini, penerapan metode studi kasus tercermin dalam analisis yang mendalam terhadap dampak korupsi pada pembangunan infrastruktur jaringan BTS 4G, dengan penekanan pada pengumpulan data terbaru untuk memahami kasus secara akurat sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Data dari penelitian terdahulu dan berita-berita terkini dijadikan sumber informasi utama untuk melakukan analisis terhadap dampak korupsi pada infrastruktur jaringan BTS 4G. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci fenomena perubahan dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dampak korupsi pada infrastruktur jaringan BTS 4G, sejalan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Salah satu kriteria dalam penilaian E-Government Development Index (EGDI) adalah Telecommunications Infrastructure Index (TII), sebagai indeks yang mengukur ketersediaan infrastruktur penunjang E-Government di suatu negara. Guna meningkatkan indeks tersebut, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur lewat program *Base Transceiver Station* (BTS) 4G yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Program tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan ekosistem digital terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dikutip dari laman kominfo, program pembangunan BTS 4G ini direncanakan dibangun pada 7.904 desa dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan pembangunan 4200 menara BTS sepanjang tahun 2021 dan tahap kedua dilakukan dengan pembangunan 3700 menara BTS sepanjang tahun 2022. Upaya pembangunan infrastruktur BTS 4G tersebut ternyata mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan ada pada ditemukannya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan proyek. Korupsi melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Direktur Utama BAKTI, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) UI Tahun 2020. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disampaikan oleh kepala BPKP bernama Muhammad Yusuf Ateh yang dilansir dari laman cnnindonesia.com, jumlah kerugian yang ditaksir pada kasus korupsi proyek ini mencapai Rp 8 Triliun. Jumlah tersebut didapatkan dari laporan audit penggunaan dana BAKTI Kominfo, dimana tiga unsur utama kerugian ada pada proses penyusunan kajian pendukung, pembayaran proyek yang belum terlaksana, dan *mark up* harga.

Telecommunications Infrastructure Index (TII) sendiri dibagi menjadi 5 kriteria penilaian, diantaranya adalah: (1) Jumlah pengguna telepon genggam, (2) Jumlah pengguna jaringan telepon, (3) Jumlah pengguna internet, (4) Jumlah pengguna jaringan nirkabel, (5) Jumlah pengguna akses internet berkecepatan tinggi. Melihat dari kelima kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa *Base Transceiver Station* (BTS) 4G menjadi infrastruktur pendukung utama yang dapat mendukung peningkatan kelima kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. BTS sendiri pada dasarnya berfungsi sebagai pemancar yang dapat mengirim dan menerima sinyal ke perangkat komunikasi. Tanpa BTS 4G, akses alat komunikasi ke jaringan internet tidak dapat dilakukan secara normal. Melihat adanya kasus korupsi yang terjadi pada pengadaan BTS 4G, menandakan bahwa pembangunan infrastruktur jaringan di Indonesia berpotensi besar menjadi terhambat. Tentunya ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan penurunan nilai EGDI di Indonesia kedepannya.

Analisis Penguatan Instrumen Pemberantasan Korupsi

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi segala bentuk tindak pidana korupsi di dalam jalannya proses pemerintahan. Salah satu program yang dilakukan adalah dengan membuat program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dilandaskan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada dasarnya adalah kerangka kebijakan nasional yang memiliki fokus dan tujuan utama untuk pencegahan korupsi. Strategi ini berfungsi sebagai panduan bagi berbagai pemangku kepentingan seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penerapan langkah-langkah antikorupsi di Indonesia. Strategi ini, yang dikenal sebagai Stranas PK, berbasis di Gedung KPK bertujuan untuk merampingkan strategi pencegahan yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Strategi ini beroperasi di bawah pengawasan Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK. Didukung oleh dua koordinator harian dan tim profesional yang terampil di bidangnya, Stranas PK mengembangkan inisiatif pencegahan korupsi yang terarah, terukur, dan berdampak besar melalui kerja sama dengan lima kementerian dan lembaga negara, yaitu: KPK, Bappenas, Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Kantor Staf Presiden.

Program tersebut sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah, namun pada pelaksanaannya tetap terdapat beberapa faktor penghambat. Pada evaluasi Stranas PK yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional (Setnas) PK pada periode waktu 2019-2020 disampaikan bahwa ada 4 faktor utama penghambat pelaksanaan pelaksanaan program. Pertama, terkait dengan bentuk sistem keterlibatan masyarakat serta organisasi masyarakat yang belum diakomodasi dengan baik. Kedua, terkait dengan regulasi turunan dari beberapa bentuk aksi penanganan korupsi yang belum jelas. Ketiga, terkait dengan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum terintegrasi dengan baik. Keempat, terkait dengan belum terlihatnya dampak pelaksanaan program bagi masyarakat. Guna mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan berdasarkan dimensi *Collaborative Governance* (Emerson dan Nabatchi, 2015). Pertama, perlu dilakukan penyesuaian landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan dari aksi program. Kedua, perlu ditingkatkannya kualitas serta kapasitas SDM, ketersediaan

anggaran, dan perbaikan sarana bagi aktor pelaksana aksi. Ketiga, perlu ditingkatkannya peran aktor eksternal pemerintah dalam peningkatan kepercayaan dalam pelaksanaan aksi baik di tingkat pusat maupun daerah. Keempat, perlu dibuat suatu sistematis keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat secara komprehensif. Kelima, perlu dilakukan peran serta setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendorong integritas. Keenam, perlu dilakukan pengukuran dampak dari pelaksanaan program Starnas PK secara berkesinambungan.

Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Infrastruktur

Melihat kasus korupsi yang terjadi pada proses pembangunan infrastruktur jaringan BTS 4G di Indonesia, menambah keyakinan penulis bahwa keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan. Saat ini keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan menurut World Bank melalui laporan Private Participation Infrastructure (PPI), Indonesia hanya melibatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sebesar 2%. Padahal infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan E-Government. Infrastruktur juga memegang peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Diperlukan dana yang sangat besar guna mengatasi pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Meskipun demikian, kapasitas pemerintah untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pembiayaan infrastruktur masih terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta masih sangat penting untuk menjembatani kesenjangan anggaran melalui berbagai pengaturan seperti inisiatif Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Seperti yang dinyatakan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR, selain mengatasi kekurangan dana, kontribusi sektor swasta juga memberikan beberapa manfaat. Manfaat tersebut antara lain mendorong kualitas layanan proyek yang lebih baik, menerapkan prinsip-prinsip efisiensi berdasarkan value for money, dan memastikan tata kelola yang lebih efektif dalam proyek-proyek infrastruktur terkait akuntabilitas kinerja.

Melalui fakta bahwa proses pembangunan infrastruktur di Indonesia kerap kali terhambat disebabkan oleh adanya kendala dan kebutuhan pembiayaan yang tinggi, maka diperlukan suatu rumusan strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Strategi pertama dapat dilakukan dengan menerapkan Collaborative Governance yang terkoordinasi antara Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kedua, pemerintah perlu memastikan kualitas dari perencanaan suatu program. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa perencanaan yang telah dicanangkan itu tepat sasaran serta bersifat efektif dan efisien termasuk didalamnya terkait dengan alokasi anggaran. Ketiga, pemerintah perlu memberikan kemudahan terkait dengan regulasi dan perizinan, karena kerap kali pembangunan infrastruktur terhambat akibat regulasi dan perizinan yang ada tidak sejalan dengan kebutuhan yang ada. Keempat, pemerintah diharapkan mampu memberikan insentif fiskal yang dapat membawa daya tarik bagi pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur. Kelima, perlu ditingkatkannya jaminan pemerintah kepada swasta terutama terkait dengan payung hukum bagi pemenuhan hak dalam proses pelaksanaan program pembangunan (Budiyanti, 2018).

Analisis Pemberdayaan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Menunjang Keberhasilan E-Government

Implementasi E-Government pada penyelenggaraan pemerintah daerah masih jauh dari kata ideal. Nugroho (2017) melakukan penelitian dengan melakukan lima model tahap perkembangan E-Government yang dikembangkan oleh UN (2016). Pada model tersebut dijelaskan bahwa tahap pertama dalam perkembangan E-Government adalah *Emerging Stage*, tahap kedua adalah *Enhanced Stage*, tahap ketiga adalah *Active Stage*, tahap keempat adalah *Transactional Stage*, dan tahap kelima adalah *Linked Stage*. Tahap pertama adalah tahapan paling rendah dan tahap kelima adalah tahapan paling tinggi. Melalui penelitiannya, didapatkan fakta bahwa terdapat 55% pemerintah daerah yang berada pada tahap pertama, 28% pada tahap kedua, 16% pada tahap ketiga, 1% pada tahap keempat, dan belum ada yang sampai ke tahap kelima. Meskipun demikian, masih banyak terjadi klaim yang menyatakan bahwa penerapan E-Government pada pemerintah daerah di suatu wilayah di Indonesia sudah baik, padahal sebenarnya klaim tersebut tidak berdasar dan hanya bersifat opini semata (Edwi, 2011). Guna memperbaiki sistem E-Government di Indonesia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada tahun 2019.

SIPD merupakan suatu bentuk pengelolaan informasi tersistematis dengan didasarkan pada alur kerja yang berkesesuaian dengan asas efisiensi serta efektifitas guna mencapai tujuan dari organisasi pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sudaning dan Seputra, 2019). Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 70 tahun 2019, jenis SIPD dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah: Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya. SIPD berupaya untuk menyatukan semua sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah guna mempermudah berbagai pihak dalam melakukan pengelolaan informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah dan publik. Maka dari itu terdapat empat aspek penting dalam pelaksanaan SIPD di Indonesia, antara lain: (1) Aspek Suprastruktur yang berkaitan dengan regulasi, edukasi, dan sumber daya manusia, (2) Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan jaringan komunikasi internet, (3) Aspek aplikasi berupa web yang mendukung pelaksanaan SIPD, dan (4) Aspek data yang berkaitan dengan konten yang terkandung di dalam SIPD. Melalui pembuatan SIPD ini diharapkan dapat mempermudah pemberdayaan pemerintah daerah dalam menunjang keberhasilan E-Government.

KESIMPULAN

Dinamika perkembangan E-Government di Indonesia terus diupayakan. Pembangunan infrastruktur jaringan internet melalui program Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo diharapkan dapat menjadi tonggak penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Namun, terungkapnya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program ini menjadi hambatan serius yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap keberhasilan E-Government. Keterlibatan tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Komunikasi dan Informatika serta Direktur Utama BAKTI,

korupsi pada proyek BTS 4G mencapai dimensi yang signifikan dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 8 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi bukan hanya mengancam keberlanjutan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyiratkan risiko terhadap kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan E-Government yang transparan dan efisien.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas E-Government dapat dilakukan dengan baik apabila dilakukan beberapa langkah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat instrumen pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dilandaskan pada asas *Collaborative Governance*, Meningkatkan keterlibatan swasta dalam melakukan pembangunan infrastruktur terutama terkait dengan infrastruktur infrastruktur jaringan BTS 4G di Indonesia yang berlandaskan pada asas *Collaborative Governance*, dan pemberdayaan kapasitas pemerintah daerah dalam menunjang E-Government melalui pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berkesesuaian dengan asas pelaksanaan SIPD secara efisiensi serta efektifitas, guna mencapai tujuan dari organisasi pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanti, E. (2018). STRATEGI PENINGKATAN PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 10.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Heriyanto, R. (2022). Urgensi Penerapan E – Government Dalam Pelayanan Publik.
- Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Nugroho, T. W. A. (2016). ANALISIS E GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.
- Patriani, I., Salam, R., Nuphanudin, Masriadi, & Dewi, N. L. Y. (2022). Digitalization in Public Administration Services in Indonesia: Pseudo or Real Digitalization, 6.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2016). United Nations E-Government Survey 2016: E Government in Support of Sustainable Development. Diakses pada 25 Agustus 2017. Tersip dalam <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi pemerintahan : E-government. *JURNAL FASILKOM*, 12(1), 14–19. <https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>
- Rahadian, A. H. (2019). REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Prosiding Seminar Stiami*, 6.

Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 11.

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>

Zahra, M. R., Permana, K. N., An Naufal, Y., & Wibowo, S. P. A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia,